



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ANDRA SONI**

Jabatan : **GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang, Januari 2026

Pihak Kedua,  
  
  
**ANDRA SONI**

Pihak Pertama,  
  
  
**MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**  
**NIP. 19710720 200212 1 004**

**SATUAN KERJA: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

**DPA TA-2026**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	66,02
2	Meningkatnya penataan kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang Ditangani	Persen	5,32
3	Terpenuhinya penyediaan PSU permukiman	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	Persen	100
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Administrasi Pertanahan yang Tertib sesuai Ketentuan	Persen	100

**PENDAPATAN DAERAH**

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.540.000</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	6.540.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.540.000</b>

**BELANJA DAERAH**

<b>KODE</b>	<b>BIDANG URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>439.667.110.000</b>
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.417.534.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	17.980.346.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	67.774.623.504
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	321.394.606.496
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>248.888.000</b>
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	59.778.000
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	189.110.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>439.915.998.000</b>

**GUBERNUR BANTEN,**  
  
**ANDRA SONI**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,**  
  
**MUCHAMAD RACHMAT ROGIANTO, ST, MT**  
**NIP. 19710720 200212 1 004**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinto Yuwono, ST, MM  
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

SERANG, 28 Januari 2026  
Pihak Pertama,



Rinto Yuwono, S.T, M.M  
NIP : 19691017 199703 1 004

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>Sasaran Program</b>				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai	80,00
<b>Sasaran Kegiatan</b>				
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,10
3	Tersusunnya pelaporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Persentase	100,00
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>				
4	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00
5	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00
6	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00
7	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00
8	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00
9	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17,00
10	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	14,00
11	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1,00
12	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1,00
13	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	6,00
14	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	140,00
15	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00
16	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00
17	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12,00
18	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00
19	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
20	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18,00
21	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>23.188.076.000,00</b>
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>23.188.076.000,00</b>
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>23.188.076.000,00</b>
<b>1.04.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.718.493.000,00</b>
1.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00
1.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00
1.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00
1.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00
1.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000,00
1.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00
1.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	283.915.000,00
1.04.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	221.327.000,00
1.04.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.000.000,00
1.04.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	938.251.000,00
<b>1.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.469.583.000,00</b>
1.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.089.583.000,00
1.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	650.000.000,00
1.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400.000.000,00
1.04.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000,00
1.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000,00
1.04.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.000.000,00
1.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00
1.04.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN Rp.</b>		<b>23.188.076.000,00</b>

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Sekretaris Dinas



Muchamad Rachmat Rojiyanto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004



Rinto Yuwono, S.T, M.M  
NIP : 19691017 199703 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mezfi Indriani, ST

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rinto Yuwono, ST, MM

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

SERANG, 28 Januari 2026  
Pihak Pertama,



Mezfi Indriani, S.T  
NIP : 19751003 201001 2 003

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>Sasaran Kegiatan</b>				
1	Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik	Persentase	100,00
2	Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Persentase	100,00
3	Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	Persentase	100,00
4	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	Persentase	100,00
5	Terpenuhinya Kebutuhan pelayanan penunjang kantor	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	Persentase	100,00
6	Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	Persentase	100,00
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>				
7	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	3,00
8	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00
9	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2,00
10	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10,00
11	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00
12	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00
13	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00
14	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00
15	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1,00
16	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00
17	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00
18	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6,00
19	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	83,00
20	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
21	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00
22	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5,00
23	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	62,00
24	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	396,00
25	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>9.229.458.000,00</b>
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>9.229.458.000,00</b>
<b>1.04</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.229.458.000,00</b>
<b>1.04.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>170.800.000,00</b>
1.04.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	68.800.000,00
1.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	102.000.000,00
<b>1.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>223.060.000,00</b>
1.04.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	122.600.000,00
1.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.460.000,00
<b>1.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.486.628.000,00</b>
1.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00
1.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	542.973.000,00
1.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.160.000,00
1.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	148.750.000,00
1.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00
1.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00
1.04.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125.000.000,00
1.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	304.745.000,00
<b>1.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.372.630.000,00</b>
1.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.372.630.000,00
<b>1.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.672.000.000,00</b>
1.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00
1.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.000.000,00
<b>1.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.304.340.000,00</b>
1.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00
1.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	985.220.000,00
1.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	480.000.000,00
1.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.639.120.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
TOTAL ANGGARAN Rp.		9.229.458.000,00

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Provinsi Banten



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

Kepala Sub Bagian Umum  
dan Kepegawaian



Mezfi Indriani, S.T  
NIP : 19751003 201001 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhadi, ST, MMT  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERUMAHAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

SERANG, 28 Januari 2026  
Pihak Pertama,



Suhadi, ST, MMT  
NIP : 19690403 200112 1 004

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>Sasaran Program</b>				
1	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase	100,00
2		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persentase	100,00
3	Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	100,00
4	Meningkatnya Ketersediaan Lahan untuk Kepentingan Umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase	100,00
5	Meningkatnya akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	100,00
<b>Sasaran Kegiatan</b>				
6	Meningkatnya Pendataan Penyediaan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase	100,00
7	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase	100,00
8	Meningkatnya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase	100,00
9	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase	100,00
10	Tercapainya fasilitas Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	Persentase fasilitas Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Persentase	100,00
11	Terlaksananya Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Tahapan Persiapan Penetapan Lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase	100,00
12	Terlaksananya Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase	100,00
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>				
13	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang tersusun	Dokumen	1,00
14	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1,00

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
15	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang tersusun dan terverifikasi	Dokumen	1,00
16	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi yang tersusun	Dokumen	1,00
17	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang	160,00
18	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	50,00
19	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1,00
20	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	unit	65,00
21	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Unit Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Unit	83,00
22	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah	264,00
23	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	1,00
24	Terlaksananya Penatausahaan SerahTerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	1,00
25	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan	1,00
26	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen	1,00
27	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu)	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria	Berita Acara	1,00
28	Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	1,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>18.080.346.000,00</b>
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>18.080.346.000,00</b>
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>17.980.346.000,00</b>
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>390.000.000,00</b>
1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	100.000.000,00
1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	95.000.000,00
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	90.000.000,00
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	105.000.000,00
<b>1.04.02.1.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>478.500.000,00</b>
1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	61.500.000,00
1.04.02.1.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	310.000.000,00
1.04.02.1.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	107.000.000,00

SIMAKIP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
<b>1.04.02.1.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>17.029.196.000,00</b>
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	4.005.410.000,00
1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	9.465.050.000,00
1.04.02.1.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	3.558.736.000,00
<b>1.04.02.1.04</b>	<b>Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>82.650.000,00</b>
1.04.02.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	52.650.000,00
1.04.02.1.04.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	30.000.000,00
<b>1.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>100.000.000,00</b>
<b>1.04.06.1.01</b>	<b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah</b>	<b>100.000.000,00</b>
1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	100.000.000,00
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>248.888.000,00</b>
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>248.888.000,00</b>
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>59.778.000,00</b>
<b>2.10.03.1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>59.778.000,00</b>
2.10.03.1.01.0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	59.778.000,00
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>189.110.000,00</b>
<b>2.10.06.1.01</b>	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>189.110.000,00</b>
2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	109.110.000,00
2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	80.000.000,00
<b>TOTAL ANGGARAN Rp.</b>		<b>18.329.234.000,00</b>

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Provinsi Banten



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

Kepala Bidang Perumahan



Suhadi, ST, MMT  
NIP : 19690403 200112 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Nugraha Dananjaya, ST

Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PERMUKIMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT

Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

SERANG, 28 Januari 2026  
Pihak Pertama,



R. Nugraha Dananjaya, ST  
NIP : 19730103 200112 1 002

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>Sasaran Program</b>				
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	Persentase	43,46
<b>Sasaran Kegiatan</b>				
2	Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Persentase	100,00
<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>				
4	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Laporan	2,00
5	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	1,00
6	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	KSM	6,00
7	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan	1,00
8	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	150,00
9	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 1	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 1	Laporan	1,00
10	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	unit	328,00
11	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Luas	61,96

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>67.774.623.504,00</b>
1.04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>67.774.623.504,00</b>
1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>67.774.623.504,00</b>
1.04.03.1.01	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>561.303.504,00</b>
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
1.04.03.1.01.0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50.000.000,00
1.04.03.1.01.0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	89.500.000,00
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	104.731.504,00
1.04.03.1.01.0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	117.072.000,00
<b>1.04.03.1.02</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>67.213.320.000,00</b>
1.04.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	135.000.000,00
1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	34.345.752.956,00
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	32.732.567.044,00
<b>TOTAL ANGGARAN Rp.</b>		<b>67.774.623.504,00</b>

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Plt. Kepala Bidang Permukiman



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004



R. Nugraha Dananjaya, ST  
NIP : 19730103 200112 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rinto Yuwono, ST, MM  
Jabatan : PLT. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

SERANG, 28 Januari 2026  
Pihak Pertama,



Rinto Yuwono, ST, MM  
NIP : 19691017 199703 1 004

No	Sasaran Program / Kegiatan / Sub	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>Sasaran Program</b>				
1	Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	100,00

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten



Muchamad Rachmat Rogianto, ST, MT  
NIP : 19710720 200212 1 004

Pt. Kepala Bidang Prasana, Sarana dan Utilitas Umum



Rinto Yuwono, ST, MM  
NIP : 19691017 199703 1 004